



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 16 September 2023

Halaman: 2

TERAS

Sampah Perkotaan

SATPOL PP Kota Yogyakarta berencana menambah kamera pengawas atau CCTV di sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi sasaran pembuang sampah sembarangan. Kamera ini dapat memonitor aktivitas masyarakat di kawasan tersebut 24 jam non-stop. Jauh lebih penting, CCTV ini dapat berfungsi untuk memantau kamtibmas yang bisa luput dari pengawasan sumber daya manusia.

Dalam operasi yang digelar Satpol PP Kota Yogyakarta bersama unsur TNI dan Polri pekan lalu, petugas gabungan berhasil mendapati 177 pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Dari jumlah tersebut 31 orang di antaranya telah melalui proses sidang tindak pidana ringan (tipiring) dengan sanksi denda masing-masing sebesar Rp 400 ribu. Denda ini diharapkan menimbulkan efek jera, sekaligus efek malu karena ulah mereka tersebut harus dipertanggungjawabkan di depan pengadilan.

Meski ancaman sanksi bagi pelanggar peraturan daerah tentang pengelolaan sampah tersebut hingga Rp 50 juta, namun majelis hakim memiliki pertimbangan bahwa para pelanggar ini dijatuhi denda lebih ringan. Bisa jadi ini adalah kasus pertama, atau mereka berjanji tidak mengulangi ulahnya lagi. Lain cerita jika pelanggar melakukan ulahnya berkali-kali, sanksi denda yang dijatuhkan bisa lebih besar. Oleh karenanya, mereka yang masih buang sampah sembarangan di Kota Yogyakarta lebih baik segera tobat. Sanksi denda tipiring tidak selalu ringan.

Meski TPA Regional Piyungan telah beroperasi kembali, namun kuota sampah dari Kota Yogyakarta masih dibatasi. Dari semula 127 ton hanya naik menjadi 135 ton per hari. Penambahan kuota 8 ton ini relatif tidak banyak, sehingga warga di Kota Yogyakarta diminta terus mengelola sampahnya secara mandiri melalui gerakan Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori Ala Jogja (Mbah Dirjo). Hingga kini gerakan Mbah Dirjo diklaim mampu mengurangi sampah organik hingga 64 ton.

Pemkot Yogyakarta juga tengah menjajaki kerja sama dengan investor lokal yang bersedia mengelola sampah perkotaan dengan teknologi modern asal Korea. Teknologi tepat guna ini diambil untuk menyesuaikan lokasi TPA di Kota Yogyakarta yang relatif tidak luas dan berdekatan dengan permukiman penduduk. Meski Pemkot Yogyakarta masih merahaskan lokasi tersebut, namun besar kemungkinan lokasinya tetap di wilayah setempat untuk menjaga kemungkinan penolakan dari masyarakat sekitar. ***

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005